

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*”, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat. Jurnal. Universitas Kepulauan Riau, Batam Indonesia
- Abdul Halim. 2012 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Arifin Sabeni dan Imam Ghazali, (2001). ”*Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*”, Edisi Empat, BPFE , Yogyakarta.
- Bodnar. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta, Salemba Empat
- Charles T.Horngren dan Walter T. Harrison Jr.2007. *Akuntansi* Jilid Satu . Edisi Tujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Davis, Gordon B, Kerangka Dasar: *Sistem Informasi Manajemen, Bagian I Pengantar. Seri Manajemen No. 90-A. Cetakan Kedua Belas*, Jakarta: PT. Pustaka Binawan Pressindo, 2002
- <File:///C:/Users/ACER/Downloads/20101-40752-1-SM.pdf>. Pengertian PAD, diakses pada 18 Maret 2021 pukul 14.37 wib.
- Halim, A. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jl Wijaya 2, Jakarta 12160: Salemba Empat.
- Haruman, Tendi & Rahayu, Sri. 2007. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta : Graha Imu.
- Ida Nuraida. (2008). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Kanisius: Yogyakarta.
- Indrajani. 2011. *Perancangan Basis Data dalam All in 1*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Kencana: Jakarta.
- L Suparwoto, (1990), *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Edisi 1. BFE, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo.(2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Rii Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Volume 2 Nomor 1. Mei 2006. Hal 2-4
- Mardiasmo. 2011. “*Perpajakan Edisi Revisi*”. Yogyakarta: Andi

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. [Permendagri-77-2020-Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf](#).

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang perbendaharaan keuangan daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menkeu Nomor : 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 sfsfsfiiiiiff Tentang Pedoman Umum Sistem Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019. Peraturan Pemerintah Jakarta: IKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. [PP Nomor 12 Tahun sfsfiiiiiiidI2019.pdf](#)

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah

Ratmono. Dwi, & Sholihin.Mahfud. (2015). “ *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*”. Cetakan pertama. Upp Stim Ykpn : Yogyakarta.

Sadeli, Lili M. 2015. *Accounting Theory*. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 2020 tentang *Tata Cara SIPD*. <https://docplayer.info/71136579-Kelompok-data-sipd-serta-tata-cara-fsfsfiiiiiff>Ipengu. Diakses pada 01 April 2021 pukul 19.21 wib.

Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Suwardjono. 2010. *Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif*. diisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.

Suwardjono. (2015). *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan*, Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang perbendaharaan keuangan daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara dan penyusunan laporan pertanggungjawaban standar akuntansi pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pendapatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah